

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) merupakan salah satu organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNICEF didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat. Dana organisasi ini berasal dari sumbangan sukarela pemerintah-pemerintah, dan pribadi-pribadi (orang-orang kaya) di seluruh dunia. Dengan bantuan lebih dari 7000 orang yang bekerja di 158 negara, membantu membangun sebuah dunia yang menghargai hak-hak anak. UNICEF bekerja di seluruh dunia untuk menanggulangi kemiskinan, kekerasan, wabah penyakit, diskriminasi, dan pendidikan. Ada pun program pendidikan yang di terapkan oleh UNICEF yaitu pendidikan dasar untuk semua. UNICEF adalah sebuah organisasi anak perusahaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah Perang Dunia II pada tanggal 11 Desember 1946. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memberikan perawatan kesehatan yang layak dan makanan untuk anak-anak dan perempuan di dunia. Fungsi UNICEF yaitu penyediaan infrastruktur pendidikan dasar di dunia, meningkatkan tingkat anak hidup di negara berkembang, kesetaraan gender melalui pendidikan bagi anak perempuan, perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan,

melindungi dari advokasi hak anak, imunisasi bayi dari berbagai penyakit, penyediaan gizi yang memadai dan air minum yang aman untuk anak-anak.¹

UNICEF sudah bekiprah di beberapa negara dalam membantu menanggulangi permasalahan anak, seperti di negara Nepal dan Nigeria. Di Nigeria dalam membantu memajukan pendidikan anak di Nigeria di tahun 2004-2007. Program pendidikan dasar atau yang dikenal dengan Basic Education programme dibentuk oleh UNICEF pada bulan Desember 2004. Program tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Federal Nigeria dan UK Department for International Development (DFID). Program ini dibentuk karena melihat kondisi pendidikan anak-anak yang berada pada jenjang sekolah dasar sangat memprihatinkan.

Program ini direalisasikan dengan kegiatan melalui dialog dengan negara, gubernur, pembuat kebijakan, pemimpin daerah, serta pemimpin agama. Melalui program ini sekolah-sekolah dibantu dengan diberikannya fasilitas berupa buku, furnitur, air bersih dan toilet yang terpisah untuk anak perempuan dan anak laki-laki disekolah. Program ini juga menyediakan dukungan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. UNICEF dan DFID memiliki misi khusus untuk mendukung adanya proyek “Girls Education” ini, dimana anak-anak perempuan di Nigeria wajib untuk mendapatkan pendidikan selama enam tahun atau wajib masuk sekolah dasar. Proyek atau program ini terutama diperuntukkan bagi anak-anak yang berada pada semua negara bagian utara

¹ Pengertian Ahli. *UNICEF: Pengertian, Tujuan, Kepanjangan UNICEF*. Diakses pada 05 Februari 2016. <<http://www.pengertianahli.com/2015/02/UNICEF-pengertian-tujuan-kepanjangan.html>>.

Nigeria seperti Borno, Katsina, Bauchi, Sokoto, Jigawa, dan Niger. Program ini di fokuskan pada negara bagian utara karena partisipasi anak perempuan yang bersekolah sangatlah rendah dibandingkan dengan negara bagian lainnya, sehingga program ini diadakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan. Program ini juga menggerakkan penyebaran lebih dari 10.000 guru perempuan ke daerah pedesaan, di mana dominasi guru laki-laki tidak ada lagi, karena banyak orang tua yang menjadi takut untuk mengirimkan anak mereka ke sekolah, sehingga dilaksanakan penyebaran guru perempuan.²

Kemudian UNICEF juga membantu menanggulangi masalah pendidikan di Nepal yang terjadi akibat gempa tahun 2015, dimana 24.000 ruang-ruang kelas rusak atau hancur. Unicef mendirikan ruang belajar alternatif bagi anak-anak sangat mendesak, serta mengkaji dan memperbaiki bangunan, dan meluncurkan kampanye kesadaran masyarakat untuk mendorong keluarga agar mengirim anak-anak mereka kembali ke sekolah dan taman kanak-kanak. Bukan hanya untuk keperluan belajar tetapi juga keselamatan mereka. Di Nepal, anak-anak berusia antara lima dan sembilan tahun diberikan pendidikan gratis dari 9:30 hingga 15:00 setiap harinya.³

² Made Ayu Melia Dwiyani, Ni Wayan Rainy Priadarsini, S.SS., M.Hub.Int, A.A.Ayu Intan Prameswari, S.IP, M.Si. *Peran UNICEF dalam Membantu Memajukan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Nigeria*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. 2014. <<http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/15671>>

³Hannah Richaedson. *BBC Indonesia. Hampir Sejuta Anak Nepal Putus Sekolah Karena Gempa*. Diakses pada 5 Mei 2017. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150508_nepal>

Ada pun Indonesia sebagai negara kepulauan dengan topografi yang beragam mengalami berbagai macam persoalan sosial, tidak terkecuali dalam hal pendidikan, terpusatnya proses politik, dan ekonomi di wilayah barat Indonesia mengakibatkan kurangnya pemerataan ke wilayah Indonesia timur, salah satunya Pulau Papua yang merupakan pulau terbesar di ujung timur Indonesia.

Masalah pendidikan secara umum terjadi hampir di seluruh tanah Papua, sehingga sangat jelas masih membutuhkan perhatian semua pihak dan kerjasama, demi mendorong perubahan pendidikan yang lebih maju. Potret pendidikan di Papua masih memprihatinkan, penanganan di bidang pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas dalam membangun SDM Papua tak kunjung direalisasikan secara maksimal. Padahal menurut Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya pada Rapat Kerja Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga seProvinsi Papua, menyatakan bahwa pembangunan sektor pendidikan memiliki peran penting dan strategis, karena itu dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Papua (OTSUS), pendidikan menjadi sektor prioritas yang berada pada urutan pertama diantara sektor-sektor prioritas lainnya.

Kondisi pendidikan di Papua yang sangat memprihatinkan dengan penduduk usia 7–12 tahun dan 13-15 tahun belum mendapat kesempatan menikmati layanan pendidikan dasar, hal ini karena terbatasnya ketersediaan gedung sekolah di sejumlah kampung yang tersebar di gunung dan lembah. Hal ini mengakibatkan anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang

seharusnya duduk dibangku pendidikan dasar namun tidak bisa menikmatinya, hal ini berakibatkan pada rendahnya capaian Angka Partisipasi Murni SD dan Angka Partisipasi Murni SMP di beberapa kabupaten yang berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf di Papua sebagai indikator pengukur keberhasilan pembangunan pendidikan oleh Milenium Development Goals (MDGs), yang secara nasional dari tahun ke tahun Indonesia selalu berada di urutan terendah. Problema pendidikan ini terlihat pula dari tingginya angka tuna aksara atau buta aksara penduduk usia 15–59 tahun. Terdapat sekitar 675,253 jiwa atau 35,98 persen dari 1,876,746 jiwamasih tuna aksara.⁴

Oleh sebab itu, layanan pendidikan harus dipastikan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke daerah–daerah terpencil dan terisolir, untuk mendongkrak IPM Papua yang berada pada 63persen dibanding rata-rata nasional 73 persen. Pendidikan di Papua masih didera masalah klasik. Antara lain ketersediaan guru yang sangat minim dan tidak merata, banyak siswa kelas enam SD yang belum mampu membaca, minimnya fasilitas penunjang, serta masih rendahnya kualitas lulusan.⁵

Mengenai masalah tenaga pendidik yang sangat minim di Papua juga sangat memprihatinkan. Padahal guru sangat memiliki peran dalam dunia pendidikan. Ruh pendidikan terletak dipundak guru. Bahkan, baik buruknya atau berhasil tidaknya pendidikan hakikatnya ada di tangan guru. Sebab, sosok guru memiliki peranan yang strategis dalam mengukir peserta didik

⁴ Jaringan Kerja Rakyat Papua. *Wajah Pendidikan Papua, Suram*. Diakses pada 5 Februari 2016. <<http://www.jeratpapua.org/2014/11/18/wajah-pendidikan-papua-suram/>>.

⁵*Ibid.*

menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral dan berpengetahuan luas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ditempat terpisah, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua mengklaim hampir di seluruh wilayah Papua, minim guru. Walau ditempatkan guru, tapi tak pernah melaksanakan tugas secara baik. Bahkan, terdapat satu sekolah dengan enam kelas, namun hanya ada satu guru saja yang mengajar.

Selain itu berbagai hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan di era OTSUS ini, ternyata mengakibatkan suramnya masa depan generasi muda Papua. Jikadilihat secara cermat, maka dana OTSUS yang dialokasikan untuk pendidikan adalah 30 persen. Dana 30 persen ini diperuntukkan bagi peningkatan SDM Papua yang berkualitas lewat pendidikan di sekolah-sekolah. Karena salah satu tujuan dari pemberian dana itu adalah untuk meringankan beban orangtua dengan cara bebas biaya pendidikan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Hal ini bukan tidak mungkin, karena Pemerintah Provinsi Papua juga mengakui adanya berbagai kekurangan dalam mengatasi bidang pendidikan di Provinsi paling timur Indonesia ini.⁶

Pemerintah Provinsi Papua dan Badan PBB untuk Anak-Anak (United Nations Children`s Fund) menjalin kerja sama peningkatan minat baca tingkat Sekolah Dasar. Kepala Pengembangan Pendidikan Kategori Remaja UNICEF, Nabendra Dahal di Jayapura mengatakan, sekitar 80 Sekolah Dasar pada empat kabupaten di Papua, yakni Biak Numfor, Mimika, Jayapura dan Jayawijaya menjadi "pilot project" program kerja sama antara Pemerintah

⁶Bakhtiyar Salam. *Mutu Pendidikan dan Jatah Otsus*. Diakses Pada 13 Maret 2016. <<http://aceh.tribunnews.com/2013/03/28/mutu-pendidikan-dan-jatah-otsus>>.

Australia dengan Pemprov Papua. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Australia menawarkan kerja sama tersebut kepada Pemerintah Provinsi Papua. Gubernur Papua menyambut baik tawaran kerja sama pendidikan ini.

Situasi pendidikan di daerah pinggiran masih perlu diperbaiki, khususnya murid-murid sekolah tingkat SD untuk kelas 1-3 harus bisa membaca dengan baik. Sebab jika sudah bisa membaca pada kelas 1-3, maka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk masa depan. Sekaligus untuk mendukung visi-misi Gubernur Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dalam meningkatkan pendidikan pada wilayah terpencil dan akan mendukung program baca tulis pada kelas awal SD. Hal ini untuk mendukung dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan di sekolah dasar, juga membantu mendukung sistem penyusunan dan pengawasan serta penganggaran di kabupaten atau kota.⁷

Peningkatan mutu pendidikan adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan. Indikator dari peningkatan mutu pendidikan di Papua dilihat juga dari profesionalitas gurunya. Jumlah guru di Provinsi Papua terus meningkat. Pada tahun 2011 atau 2012 jumlah guru di Papua 2669 orang, kemudian di tahun 2012 atau 2013 jumlah guru sebesar 2633 orang dan 2503 orang pada tahun 2014. Di Papua selain keterbatasan pengajar, pengajar yang sudah ada juga belum menjalankan tugasnya dengan baik. Maka untuk mewujudkan peningkatan pendidikan di Papua ini guru harus memiliki kecintaan dan berkomitmen terhadap profesi. Kemudian

⁷ Antara Papua. *Pemprov Papua dan UNICEF Jalin Kerja Sama Tingkatkan Minat Baca*. Diakses pada 17 Januari 2017. <<http://www.antarapapua.com/berita/451712/pemprov-papua-dan-UNICEF-jalin-kerja-sama-tingkatkan-minat-baca>>

jumlah gedung sekolah yang ada di Papua juga dari 170 gedung sekolah pada tahun 2010 juga meningkat menjadi 197 sekolah pada tahun 2014. Selain itu Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Papua.

UNICEF yang merupakan organisasi internasional yang berfokus terhadap persoalan anak di dunia memandang bahwa kondisi pendidikan anak di Papua membutuhkan penanganan maksimal. Dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah papuan dan pihak-pihak lain, UNICEF berusaha untuk lebih memahami situasi anak-anak di Papua guna meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi anak, demi menjangkau pihak-pihak yang belum terjangkau, dan menciptakan ruang bagi anak-anak dan remaja dimana mereka bisa mengungkapkan keprihatinan mereka dan berpartisipasi dalam menangani isu-isu yang mempengaruhi mereka. Latar belakang tersebut menjadi alasan yang secara akademik mendorong penulis untuk mengangkat skripsi ini dengan judul, **“Peran United Nation Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam peningkatan mutu pendidikan anak di Papua 2010-2015”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana peran United Nation Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam peningkatan mutu pendidikan anak di Papua 2010-2015?”**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan antara lain :

1. Untuk memberi gambaran mengenai upaya UNICEF dalam meningkatkan mutu pendidikan anak di Papua pada tahun 2010-2015.
2. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan bukti, data dan fakta serta membuktikan hipotesa dengan teori yang relevan.

D. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan preposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab akibat yang terjadi. John W Creswell dalam bukunya yang berjudul *Research Design* mendefinisikan teori sebagai serangkaian bagian atau variabel, definisi, dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamia. Labovitz dan Hegedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.⁸

Ada pun dalam upaya menjawab rumusan masalah dan menarik hipotesa, penulis menggunakan pendekatan konsep peran dan teori kerjasama transnasional issues yang relevan untuk menganalisis peran UNICEF dalam

⁸ Yanuar Ikbar. 2014. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung. PT Rafika Aditama. Hal. 51.

meningkatkan mutu pendidikan anak di Papua. Gambaran tentang pendekatan diuraikan sebagai berikut:

1. Konsep Peran

Peran adalah sebuah konsep yang dulu biasa dikembangkan dalam ilmu sosial dan psikologi sosial untuk mengindikasikan pola karakteristik aktor yang menduduki posisi tertentu. Hal ini berarti bahwa setiap individu, organisasi, atau negara sebagai aktor yang diberi posisi tertentu diharapkan untuk bertindak sebagaimana tindakan itu diambil sesuai dengan posisi yang dijabat.⁹

Menurut Dougherty dan Pritchard (1985) dalam Bauer, teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Lebih lanjut Dougherty dan Pritchard (1985) dalam Bauer mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan tergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran. Ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi.¹⁰

⁹ Lisbeth Aggestam . *Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy*. Diakses pada 20 November 2016. <http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/1994-2000/1999/wp99_8.htm>.

¹⁰ Yanuar Ikbar. *op.cit.*, Hal. 235.

Teori peran ini menekankan bahwa kita hanya akan mampu menjelaskan fenomena politik jika melihat individu sebagai pembuatan keputusan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya. Mereka akan selalu dibatasi oleh lingkungannya. Peranan atau role adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Setiap orang yang menduduki suatu posisi diharapkan akan bertindak sesuai dengan sifat posisinya itu.¹¹

Setiap organisasi memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh struktur apabila setiap struktur yang ada telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut, berarti organisasi itu dikatakan sudah menjalankan peranan. Peranan dari suatu struktur singular maupun yang bersusun ditentukan oleh harapan orang lain atau oleh perilaku peran itu sendiri dan juga ditentukan oleh kepekaan pemegang peranan terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan tadi serta dipengaruhi juga oleh kemampuan dan keahlian dari si pemegang peranan. Peranan juga merupakan unsur yang dinamis dari kedudukan yang lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri suatu proses agar kedudukannya diakui oleh masyarakat.¹²

Konsep peranan ini berhubungan dan harus dibedakan dengan posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen dari anatomi organisasi, lokasi dalam ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi, sedangkan peranan adalah aspek dari fisiologi organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi dan proses peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural

¹¹ Iva Rachmawati. 2012. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo. Hal. 63.

¹² Yanuar Ikbar. *op.cit.*, Hal. 226.

(norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lain-lain), serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Konsep peranan sebagaimana sebagaimana dikemukakan Hosti yakni National Role secara aplikasi dapat dihubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Archer menyangkut peranan organisasi internasional dengan menjelaskan sebagai berikut: yakni sebagai alat (instrument), dalam hal ini organisasi internasional menjadi alat untuk memenuhi kepentingan anggotanya walaupun mungkin secara konstitusional ada pembatasan kekuasaan (kedaulatan) negara bertindak secara otonom. Sebagai arena (forum) organisasi internasional menjadi tempat pertemuan bagi negara anggotanya untuk berdiskusi, berargumentasi, dan bekerjasama. Sebagai aktor, organisasi internasional sebagai independent aktor, sehingga dapat bertindak tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh aktor-aktor lainnya.¹³

Konsep peranan nasional berkaitan erat dengan orientasi politik luar negeri. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan terhadap variable sistemik, geografi dan ekonomi. Meskipun berkaitan dengan orientasi, peranan nasional nampak lebih spesifik daripada orientasi, karena peranan lebih menunjukkan atau memiliki ciri-ciri yang mengarah pada tindakan yang lebih kongkrit dibanding orientasi.¹⁴

Menurut Alan C. Isaak, harapan dapat muncul dua jenis sumber. Pertama, itu bisa berasal dari harapan orang lain terhadap seorang aktor

¹³*Ibid.*, Hal. 227.

¹⁴*Ibid.*

politik. Artinya, setiap orang pasti memiliki suatu gagasan tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aktor politik. Jadi, jenis sumber pengaruh pertama yang disebut dalam teori peran adalah hubungan orang lain terhadap pemegang peran dengan persepsi si pemegang peran terhadap harapan itu. Kedua, harapan itu juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapan sendiri tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan.

Menurut Isaak, harapan bisa berasal dari dalam diri sang aktor, yakni apa yang diharapkan aktor tersebut terhadap peran yang didapatkannya. Harapan juga bisa timbul dari persepsi diri sang aktor tentang peranan yang dimilikinya, apa saja yang harus ia lakukan maupun yang tidak bisa yang ia lakukan. Harapan yang berasal dari diri sang aktor akan menjadi sebuah gagasan bagi dirinya sendiri yang biasanya mencerminkan sikap, kepribadian dan ideologi yang berkembang dalam dirinya, bahkan sebelum ia memegang peranan yang sedang dimainkan. Selain harapan dari diri sang aktor, harapanpun bisa datang dari luar dirinya, misalnya dari kelompok pendukung atau bisa juga dari pihak-pihak yang tidak mendukungnya.¹⁵

Ada pun UNICEF yang berfokus dalam menangani persoalan anak-anak berusaha untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencapai mutu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi anak. Keterlibatan UNICEF di Indonesia sendiri khususnya Papua dalam menangani anak-anak

¹⁵Mochtar Mas' oed. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta. Pusat antar Universitas Studi sosial Universitas Gajah Mada. Hal. 45-46.

Papua yang sulit mengakses pendidikan yang baik sehingga mengakibatkan masih banyaknya anak-anak yang tidak bersekolah, menjelaskan bahwa UNICEF berusaha untuk menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal sebagai organisasi internasional dalam bidang sosial dan budaya. Dan anak-anak juga pemerintah daerah di Papua sendiri memiliki harapan kepada UNICEF agar program-program dan upaya UNICEF dalam meningkatkan mutu pendidikan di Papua dapat terwujud tidak hanya di satu Kabupaten saja melainkan di seluruh kabupaten di Papua yang mutu pendidikannya tertinggal.

2. Konsep Transnational Issues

Studi transnasionalisme menekankan keterkaitan atau ikatan dalam masyarakat yang termasuk di dalamnya tidak selalu didominasi hubungan antar negara saja. Menurut Richard Falk, transnasionalisme sebagai perpindahan barang, informasi, dan gagasan melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah. Pola hubungan ini melibatkan partisipasi besar-besaran dari berbagai jenis aktor non-negara, terutama organisasi non pemerintah dalam negeri maupun internasional. Suatu proses dimana hubungan internasional yang dijalankan oleh pemerintah disertai pula dengan interaksi antar individu, kelompok, dan masyarakat yang dapat memberi pengaruh bagi arah kejadian. Setiap aktor baik negara, organisasi internasional maupun organisasi non-pemerintah, memiliki kelemahan dan membutuhkan peranan aktor-aktor lain.

Dan ini membuat semua aktor punya kemampuan untuk mempengaruhi aktor lain.¹⁶

Disini UNICEF untuk mencapai tujuannya dalam membangun pendidikan anak-anak di Papua bekerjasama dengan pemerintah luar negeri dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang ikut turut serta ingin membantu mengembangkan pendidikan di Papua.

Seperti yang sudah pernah dilaksanakan UNICEF di Nigeria dalam membantu memajukan pendidikan anak di Nigeria di tahun 2004-2007. Program pendidikan dasar atau yang dikenal dengan *Basic Education programme* dibentuk oleh UNICEF pada bulan Desember 2004. Program tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Federal Nigeria dan UK Department for International Development (DFID). Program ini dibentuk karena melihat kondisi pendidikan anak-anak yang berada pada jenjang sekolah dasar sangat memprihatinkan.

Program inidirealisasikan dengan kegiatan melalui dialog dengan negara, gubernur, pembuat kebijakan, pemimpin daerah, serta pemimpin agama. Melalui program ini sekolah-sekolah dibantu dengan diberikannya fasilitas berupa buku, furnitur, air bersih dan toilet yang terpisah untuk anak perempuan dan anak laki-lakidisekolah. Program ini juga menyediakan dukungan pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal. UNICEF dan DFID memiliki misi khusus untuk mendukung adanya proyek “Girls Education” ini, di mana anak-anak perempuan di Nigeria wajib untuk mendapatkan pendidikan selama enam tahun atau wajib masuk sekolah dasar.

¹⁶ Ibid. Hal. 378

Proyek atau program ini terutama diperuntukkan bagi anak-anak yang berada pada semua negara bagian utara Nigeria seperti Borno, Katsina, Bauchi, Sokoto, Jigawa, dan Niger. Program ini di fokuskan pada negara bagian utara karena partisipasi anak perempuan yang bersekolah sangatlah rendah dibandingkan dengan negara bagian lainnya, sehingga program ini diadakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan. Program ini juga menggerakkan penyebaran lebih dari 10.000 guru perempuan ke daerah pedesaan, di mana dominasi guru laki-laki tidak ada lagi, karena banyak orang tua yang menjadi takut untuk mengirimka anak mereka ke sekolah, sehingga dilaksanakan penyebaran guru perempuan. UNICEF di Nigeria selain menjalankan program-program yang berhubungan langsung dengan pendidikan seperti pembangunan sekolah, pemberian kurikulum, organisasi internasional tersebut juga memiliki suatu program mengenai pemenuhan hak anak atas pendidikan namun programnyaini tidak secara langsung difokuskan bagi sekolah namun lebih kepada membangun minat anak untuk kembali bersekolah. *Voices from the Street* merupakan sebuah seri dalam suatu program radio yang difokuskan bagi anak jalanan, yang dibuat oleh UNICEF untuk anak-anak Nigeria yang secara langsung mempresentasikan tentang keadaan anak jalanan dari seri program radio tersebut. Program tersebut dibuat dengan tujuan agar anak-anak Nigeria ingin memiliki keinginan kembali bersekolah.

Program radio seri *Voices from the Street* ini dijalankan dengan cara menceritakan kisah melalui saluran radio yaitu dengan mengumpulkan anak-anak yang putus sekolah yang kebanyakan anak merupakan pekerja

anak dan memiliki kisah yang berat dalam menjalani hidup namun dibalik itu semua mereka masih mempunyai cita-cita dan ingin melanjutkan pendidikannya yaitu dengan bersekolah. Program radio ini telah berhasil diadakan di negara bagian Nigeria yaitu di Lagos dan Kano. Anak-anak tersebut dikumpulkan lalu mereka menceritakan kisah mereka di radio nasional Nigeria melalui proyek yang didukung UNICEF ini. Program ini juga mendapat dukungan penuh selain dari UNICEF juga dari Radio Nigeria Kaduna, National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP), dan dukungan inisiatif dari anak-anak Almajiri. Dengan adanya siaran di radio tersebut diharapkan mampu membuka hati anak-anak yang lain untuk berjuang meraih cita-cita dengan segala keterbatasan.¹⁷

Melihat peran dan program-program yang sudah diterapkan UNICEF dalam membantu kemajuan pendidikan anak di Nigeria di tahun 2004-2007, maka peran tersebut juga dapat diterapkan UNICEF dalam meningkatkan mutu pendidikan di Papua di tahun 2010-2015.

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis berpendapat bahwa UNICEF sebagai fasilitator berperan dalam melaksanakan program yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di Papua pada tahun 2010-2015 dengan menyediakan gedung-gedung sekolah dan mengirimkan banyak guru ke sekolah di Papua melalui berbagai

¹⁷ Ibid

bentuk kerjasama pengembangan pendidikan dengan beberapa pihak terkait yang berkepentingan seperti pemerintah luar negeri dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat.

F. Jangkauan Penelitian

Pembatasan dalam penelitian dilakukan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar permasalahan dan kajian melebur dan wacana yang telah ditetapkan untuk dikaji agar tidak terjadi penyimpangan. Batas-batas dari kajian itu akan mencegah timbulnya kekaburan dan kerancuan wilayah yang dibahas.

Mutu dan tingkat pendidikan di Papua masih sangat rendah dibanding daerah-daerah lainya. Pada tahun 2010-2015 meski pemerintah Papua sudah menurunkan dana khusus untuk peningkatan kualitas pendidikan di Papua, namun masih saja terhambat oleh beberapa faktor seperti rendahnya perekonomian masyarakatnya yang menyebabkan banyak anak di Papua tidak memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Akan tetapi tidak menutup juga kemungkinan penulis akan menengok peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah di luar masa tersebut yang dapat mendukung penelitian atas penulisan skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Library Research dengan memanfaatkan data-data sekunder yang

pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, dianalisa dan disimpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan hasil penelitian skripsi yang penulis susun, maka penulis menyusun pembahasan yang berupa :

BAB I Bagian ini akan menjabarkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Bagian ini akan membahas gambaran umum tentang UNICEF.

- A. Profil UNICEF.
- B. Sejarah berdirinya UNICEF.
- C. UNICEF di Indonesia.

BAB III Bagian ini akan membahas tentang kondisi pendidikan di Papua khususnya pada tahun 2010-2015.

- A. Faktor penghambat kemajuan mutu pendidikan di Papua.
- B. Usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Papua.

BAB IV Bagian ini akan menjelaskan tentang peran dan bentuk kerjasama-kerjasama yang dilakukan UNICEF dan beberapa pihak terkait dalam meningkatkan mutu pendidikan di Papua pada tahun 2010-2015.

BAB V Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan.